KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

1/6							
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 4 3 9 H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan					
A. IDENTITAS PE	ENERIMA PENGHASILA	AN YANG DIPOTONG			•		
A.1 NPWP : 3 4 4 8 1 6 9 3 9 7 2 2 0 0 0							
A.2 NIK : [
A.3 Nama : DINI ADRIYANTI							
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK PAJAK		JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER-	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.2	В.3	B.4	NPWP)	B.6	B.7	
1	21-402-01	31.665.500		0	5	1.583.275	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota							
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen Nama Dokumen Nama Dokumen Faktur Pajak Tanggal Z 5 dd D 2 mm Z 0 2 2 yyyyy B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB. Nomor: Tanggal D dd Mm Mm Mm Mm Mm Mm Mm Mm Mm							
C.1 NPWP Instansi Pemerintah :		9 5 3 3 5	0 1 6 2 7 2 2	0 0 0			
C.2 Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR							
C.3 ID Subunit (Organisasi :						
C.4 Tanggal :		2 6 dd 0 1 mm	2 0 2 2 yyyy				
C.5 Nama Penandatangan : HARI JUMADI							
C.6 Pernyataan	.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.						
		Sesuai dengan ketentuan yang elektronik sehingga tidak diper	g berlaku, Direktorat Jenderal Pajak lukan tanda tangan.	k mengatur bahwa c	lokumen ini tela	ah ditandatangani secara	

BHYAEA27